

Konflik Sosial Warga Desa Sumurgeneng Akibat Pembangunan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft

Yustanti^{1*} dan M. Jacky²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
yustantiyustanti16040564058@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The level of oil availability is decreasing but the level of consumer demand is increasing in Indonesia so that there is a gap. This gap has forced the government to import oil from other countries. Oil imports from other countries hamper the Indonesian economy. Therefore, in the National Strategic Program (PSN) there is a policy to build new oil refineries in order to grow the Indonesian economy. One of PSN's policies is the construction of the PT Pertamina-Rosneft oil refinery in Tuban. The construction sites are in Sumurgeneng Village, Wadung Village, Mentoso Village, Rawasan Village and Kaliuntu Village. The location determination was based on a Governor's Decree which sparked a conflict over land between villagers in Jenu District who were affected and PT Pertamina. The research aims to identify the causes and effects of conflict based on Noer Fauzi Rachman and to identify the analysis of conflict functions based on Lewis Alfred Coser. Research using descriptive qualitative method. The research was conducted in Sumurgeneng Village, because it has the largest number of farm workers among the 5 affected villages. The results of the study stated that the cause of the conflict was due to a location determination policy letter that changed the identity of agricultural land to oil and gas areas. As well as data manipulation, intimidation and criminalization of farmers. The result of the conflict is the loss of livelihoods of farmers and the job function of farmers to become laborers. Based on the analysis of Lewis Alfred Coser's function theory, it was found that the conflict that occurs is a realistic conflict. It was found that the in-group group category consisted of residents of Jenu sub-district who were against development, the out-group group consisted of pro-development groups consisting of PT Pertamina, village officials, the government and residents who were pro-development. Found a group that was formed specifically to reduce tension conditions. The group is the Farmer's Youth Group and the Agrarian Emergency Tuban.

Tingkat ketersediaan minyak semakin menurun namun tingkat kebutuhan konsumen semakin naik di Indonesia sehingga terjadi kesenjangan. Kesenjangan tersebut membuat pemerintah melakukan kegiatan impor minyak dari negara lain. Impor minyak dari negara lain membuat perekonomian di Indonesia terhambat. Oleh karena itu pada Program Strategis Nasional (PSN) terdapat kebijakan pembangunan kilang minyak baru guna menumbuhkan perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan PSN adalah pembangunan kilang minyak PT Pertamina-Rosneft di Tuban. Lokasi pembangunan di Desa Sumurgeneng, Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan, dan Desa Kaliuntu. Penetapan Lokasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang memicu konflik perebutan lahan antara warga desa di Kecamatan Jenu yang terdampak dengan pihak PT Pertamina. Penelitian bertujuan untuk identifikasi sebab-akibat konflik berdasarkan Noer Fauzi Rachman serta identifikasi analisa fungsi konflik berdasarkan Lewis Alfred Coser. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Sumurgeneng, karena memiliki jumlah pekerja tani paling banyak diantara 5 desa terdampak. Hasil penelitian menyatakan penyebab konflik karena adanya surat kebijakan penetapan lokasi yang mengganti identitas tanah pertanian menjadi wilayah migas. Serta adanya manipulasi data, intimidasi serta kriminalisasi kepada petani. Akibat dari konflik adalah hilangnya mata pencaharian petani dan ahli fungsi pekerjaan petani menjadi buruh. Berdasarkan analisa dari teori fungsi Lewis Alfred Coser ditemukan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik realistik. Ditemukan kategori kelompok in-group terdiri dari warga kecamatan Jenu yang kontra terhadap pembangunan, kelompok out-group terdiri dari kelompok pro pembangunan terdiri dari PT Pertamina, perangkat desa, pemerintah serta warga yang pro terhadap pembangunan. Ditemukan kelompok yang dibentuk khusus untuk menurunkan kondisi ketegangan. Kelompok tersebut merupakan Golongan Pemuda Tani dan Tuban Darurat Agraria.

Keywords: The Function of Conflict; Cause of Conflict; Agrarian Conflicts; Oil Refinery; Realistic Conflict.

1. Pendahuluan

Minyak bumi dibutuhkan kehidupan manusia sebagai sumber energi primer. Minyak bumi berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi energi dunia. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, minyak bumi merupakan sumber energi yang strategis namun tidak dapat tergantikan. Minyak bumi sebagai komoditi vital yang dikuasai oleh negara karena berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Minyak bumi tersebut melalui proses pengolahan agar dapat dikonsumsi. Pengolahan minyak merupakan proses pemurnian minyak mentah. Proses tersebut dilakukan guna menghasilkan produk-produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Non-BBM. Produk tersebut berguna pada kehidupan sehari-hari, contohnya produk berupa LPG dibutuhkan sebagai sumber energi kompor. BBM berupa bensin digunakan sebagai sumber energi kendaraan agar dapat bepergian antar-tempat.

Kebutuhan BBM di Indonesia mencapai 47 juta kilo liter per tahun. Berdasarkan Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PT PLN), kebutuhan tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2050 mendatang. Pada kategori hitungan rata-rata per hari, kebutuhan BBM di Indonesia mencapai 1,6 juta barel. Prediksi bahwa kebutuhan terus meningkat dikarenakan tingkat konsumsi juga meningkat. Tingkat kebutuhan konsumsi yang meningkat juga dikarenakan terdapat kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM. Pelaksanaan kebijakan subsidi berlangsung pada tempo waktu yang lama. Sumber subsidi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan kebijakan subsidi bertujuan untuk meringankan masyarakat dengan perekonomian rendah, namun yang merasakan manfaat kebijakan subsidi tersebut bukan masyarakat perekonomian rendah melainkan masyarakat kelas menengah yang mampu membeli BBM dengan harga subsidi. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan keuangan pada APBN sehingga perekonomian Indonesia ikut terpengaruh.

Dalam pemenuhan kebutuhan minyak di Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan kilang minyak di Indonesia. Selama ini operasional kilang minyak terbesar dilakukan oleh PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketersediaan BBM dalam negeri sebesar 99% dikelola oleh PT Pertamina, sisanya dikelola oleh perusahaan swasta dan perusahaan kecil milik pemerintah. Kemampuan produksi kilang minyak tersebut hanya menghasilkan kapasitas sebesar 700 ribu hingga 800 ribu barel per hari. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jangka waktu ketersediaan minyak mentah saat ini hanya bertahan selama 23 tahun ke depan. Hal tersebut dikarenakan menurunnya tingkat produksi minyak yang telah terjadi semenjak tahun 1990. Penurunan produksi minyak dikarenakan kurangnya eksplorasi dan investasi perusahaan pada sektor minyak.

Kondisi Indonesia mengalami penurunan produksi minyak sementara pertumbuhan kebutuhan konsumsi minyak semakin bertambah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan minyak dengan tingkat konsumsi minyak. Dalam menangani upaya tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan cara impor minyak dari negara lain. Kegiatan impor tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2004 hingga saat ini. Jumlah impor yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 50% dari total kebutuhan konsumsi minyak BBM. Persentase tersebut berjumlah 350.000 hingga 500.000 barel per hari.

Pengaruh impor minyak dari berbagai negara membuat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terhambat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang percepatan pembangunan infrastruktur pada sektor migas. Salah satu kebijakan tersebut tertuang pada Program Strategis Nasional (PSN) yang menjelaskan tentang pembangunan kilang minyak di Tuban Provinsi

Jawa timur, Pembangunan di Bontang Provinsi Kalimantan Timur, serta upgrading pembangunan kilang minyak di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 56 Tahun 2017 pergantian dari Perpres No. 3 Tahun 2016, terdapat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Salah satu kebijakan PSN adalah program pembangunan kilang minyak di Indonesia. Pembangunan dilakukan di Bontang, Kalimantan Timur; di Tuban, Jawa timur; serta melakukan upgrading terhadap kilang di Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur kilang minyak memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan kilang minyak berperan dalam menambah persediaan minyak di Indonesia, sehingga mengurangi import di luar negeri. Diketahui bahwa kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi kilang minyak di Indonesia hanya mampu menghasilkan 700 hingga 800 ribu barel per hari. Sehingga terjadi ketimpangan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan minyak di Indonesia. Ketimpangan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia impor minyak di luar negeri. Jumlah minyak yang diimpor oleh pemerintah sebesar 50% dari jumlah kebutuhan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur pada bidang minyak dan gas. Tujuan pembangunan kilang minyak di Tuban karena diprediksi akan menghasilkan minyak sebesar 300 ribu barel perhari, sehingga angka impor dapat menurun.

Pembangunan tersebut membutuhkan ruang lahan guna terlaksananya program. Pada pembangunan kilang minyak di Tuban Provinsi Jawa Timur, lokasi pembangunan telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Terdapat 5 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kilang minyak. Desa tersebut merupakan Desa Sumurgeneng, Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan, dan Desa Kaliuntu.

2. Kajian Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian dengan judul “Komunikasi Ritual Masyarakat Terdampak Dalam Menolak Pembangunan Kilang Minyak New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban” pada tahun 2019 yang mendeskripsikan komunikasi masyarakat terdampak dalam menolak pembangunan kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban secara religi. Penelitian ini menggunakan teori konsep komunikasi ritual dengan model komunikasi Harold D. Lasswell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Menolak pembangunan kilang minyak melalui 2 aksi. Komunikasi instrumental berupa demonstrasi dan pemasangan spanduk. Komunikasi ritual berupa bujukan tolak balak.

2.2. Sebab Konflik oleh Noer fauzi Rachman

Terdapat 4 (empat) penyebab konflik, yaitu: Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi; Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi; Ekstensi sekelompok rakyat

pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut.; Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

2.3. Analisa Fungsi Konflik oleh Lewis Alfred Coser

Lewis Alfred Coser diketahui sebagai salah satu pendahulu sosiologi konflik structural. Coser dilahirkan pada tahun 1913 oleh keluarga Yahudi di kota Berlin, Jerman. Coser pindah ke Perancis pada masa Hitler. Hal tersebut dikarenakan Coser menjadi anggota mahasiswa Gerakan sosialis. Coser tinggal tanpa pekerjaan di Perancis. Coser dikenal sebagai sosiolog terkemuka saat belajar studi komparatif di Universitas Sorbonne Perancis. Perang di Jerman menjadi pecah pada masa itu sehingga mengharuskan Coser pindah ke Amerika Serikat. Setelah pindah, Coser bekerja sebagai pengajar pada beberapa universitas. Coser pernah mengajar di Universitas Chicago kemudian pindah ke Universitas Brandeis. Swagian besar karir akademis Coser dihabiskan pada universitas tersebut. Coser menjadi profesor sosiologi luar biasa pada tahun 1968 di Universitas New York dan Stony Brook. Coser sempat dijadikan sebagai ketua ikatan sosiologi Amerika Serikat (American Sosiologi Association/ASA).

Pada tahun 1968, Coser menerbitkan buku *The Functions of Social Conflict*. Buku tersebut berisi kontribusi Coser tentang sosiologi Konflik. Berdasarkan Coser, konflik memiliki fungsi positif pada sistem sosial. Coser tidak setuju dengan pendapat bahwa konflik hanya bersifat negatif. Konflik juga berfungsi positif pada sistem masyarakat melalui perubahan sosial yang terjadi. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh sosiologi konflik berdasarkan Simmel. Simmel berpendapat bahwa konflik merupakan factor yang berfungsi positif. Hal tersebut ditunjukkan berdasar sejarah penyatuan kelompok sosial. Pendapat tentang fungsi konflik sosial dalam sistem sosial disepakati oleh Coser. Sistem sosial tersebut berdasarkan hubungan pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas. Coser melihat hubungan antara konflik dan perubahan sosial.. coser berpendapat bahwa Konflik merupakan mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian. Memberi peran positif atau fungsi positif dalam masyarakat.

Hubungan kelompok dalam dan kelompok luar merupakan dinamika paling jelas dari fungsi konflik positif artinya kelompok dalam akan memperkuat solidaritas dan integrasi sebagai akibat dari permusuhan dengan kelompok luar kekuatan solidaritas dan integrasi kelompok dalam bergantung pada level permusuhan dengan kelompok luar kekuatan solidaritas akan menentukan batas konflik antar kelompok yang berkonflik pada proses konflik internal kelompok berpotensi memiliki toleransi yang berkurang dan tuntutan konsensus serta conformitas semakin tinggi pelaku penyimpang pada kelompok yang menyebabkan berkurangnya toleransi akan ditindak oleh internal kelompok dengan cara melakukan pengawasan secara Intens sebaliknya jika konflik dengan kelompok luar memiliki ancaman yang rendah maka tingkat solidaritas kelompok dalam akan berkurang fungsi konflik eksternal sangat penting dalam membangun solidaritas internal Adapun ancaman dari luar akan membantu meningkatkan atau mempertahankan solidaritas internal

Hubungan internal kelompok dengan kelompok luar yang dianggap sebagai musuh memiliki dua tipe yang berbeda Pertama hubungan secara langsung antar kelompok yang berkonflik berkategori minim atau tidak pernah ada pertemuan artinya kelompok luar merupakan musuh yang berkompetensi secara tidak langsung kedua adanya interaksi dari anggota internal kelompok dalam dengan kelompok luar interaksi tersebut dikarenakan beberapa anggota dari kelompok dalam memiliki hubungan sosial dengan kelompok luar alasan dari hubungan tersebut karena anggota internal ingin berdamai dengan kelompok luar daripada pejuang melawan Merugikan dirinya Namun hubungan tersebut akan

menimbulkan anggota internal lainnya menganggap hubungan pengkhianat dan akan dijadikan sebagai kambing hitam poster mengemukakan bahwa ancaman dapat menyebabkan sentralisasi kekuasaan pada kelompok sentralisasi tersebut bergantung pada level konflik yang terjadi jika ancaman dari konflik dan level tinggi maka sentralisasi kekuasaan juga meningkat hal tersebut diperlukan agar tindakan dalam melawan musuh menjadi lebih terkoordinasi sentralisasi konflik dapat bersifat menekan jika solidaritas dari internal kelompok digunakan memperkuat solidaritas internal namun kasar juga menyatakan bahwa rendahnya solidaritas kelompok dapat menyikapi konflik eksternal dengan cara yang lebih tidak peduli sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik yang lebih kompleks dalam kelompok itu sendiri

Analisis pasar juga menyatakan bahwa ada kemungkinan kepentingan yang saling bertolak belakang sehingga menimbulkan rasa permusuhan tersebut dipendam oleh pelaku yang berkonflik hasil dari rasa yang dipendam juga bermacam-macam tergantung pada hubungan timbal balik intensitas hubungan emosional dan faktor yang lainnya namun pasar menempakategori klasifikasikan Hasil tersebut menjadi dua konsekuensi pertama konflik yang dipendam memiliki konsekuensi putusnya hubungan Jika hubungan emosional berlabel tinggi Maka konflik kecil akan dipendam dan menjadi menumpu ketika emosi konflik tersebut sudah tidak dapat di bendung lagi maka hubungan akan cepat putus dengan meledakkan konflik yang dipendam tersebut kedua konflik yang dipendam dapat memiliki konsekuensi membelokkan rasa permusuhan dengan konflik yang sebenarnya atau konflik secara langsung dan lebih memilih mencari solusi untuk mengungkapkan konflik tersebut solusi tersebut merupakan alternatif agar konflik dapat diungkapkan dan menyalurkan emosi yang dipendam alternatif tersebut dilakukan dengan cara membentuk katup penyelamat atau safety valve safety valve digunakan agar menyalurkan konflik tanpa merusak seluruh Solidaritas

Coser membagi konflik dalam dua tipe yaitu konflik realistik dan konflik non realistik konflik realistik merupakan konflik sebagai akibat dari munculnya tuntutan tuntutan khusus yang belum mencapai atau disepakati tuntutan yang belum disepakati menimbulkan rasa kecewa dan ditujukan kepada objek atau kelompok yang dianggap mengecewakan konflik realistik diikuti oleh emosional sentimen karena ketegangan situasi yang diungkapkan sedangkan konflik non realistik merupakan konflik yang muncul paling tidak dari salah satu pihak karena adanya kebutuhan untuk meredakan ketegangan usaha meredakan ketegangan digunakan untuk membelokkan konflik yang semestinya atau yang berlangsung konser mengemukakan bahwa pada zaman masyarakat buta huruf maka gambaran konflik dan realistik adalah dengan cara namun saat zaman modern ini gambaran konflik non realistik menjadi berkembang cara yang digunakan pada zaman modern adalah dengan penggambaringhitaman seorang yang dianggap musuh dan dijadikan target untuk melampiaskan kemarahan

3. Metode Penelitian (minimal 250 kata)

Penelitian dengan judul “Solidaritas Warga Dusun Pomahan Dalam Penolakan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft Tuban” menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Mazhab penelitian tersebut berpacu pada mazhab positivis. Mazhab tersebut melihat konflik penolakan kilang minyak secara objektif guna untuk mengetahui bentuk solidaritas warga Dusun Pomahan. Analisa yang digunakan bersifat makro. Teori yang digunakan pada penelitian ini merupakan teori fungsi oleh Lewis Alfred Coser.

Penelitian Solidaritas Warga Dusun Pomahan Dalam Penolakan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft Tuban menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menganut mazhab positivis sehingga objektif terhadap pengamatan Warga Dusun Pomahan dan

bersifat analisa makro. Teori yang digunakan penelitian berpacu pada teori konflik struktural yang fokus pada teori fungsi konflik oleh Lewis Alfred Coser. Dalam analisa fungsi konflik penolakan kilang minyak, terdapat aspek solidaritas yang digunakan untuk mengetahui apakah konflik tersebut memiliki fungsi positif. Penelitian ini berfungsi melihat solidaritas Warga Dusun Pomahan dalam menghadapi penolakan Kilang Minyak di Tuban. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi serta unsur solidaritas pada Dusun Pomahan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur agar menggali informasi sedalam-dalamnya. Wawancara melalui key informan yang terpilih dengan tujuan mengetahui lebih dalam konflik yang terjadi serta key informan sebagai tokoh penting pada konflik tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Tipe Konflik Warga Desa Sumurgeneng Berdasarkan Sumber Konflik

Konflik di Desa Sumurgeneng terjadi akibat pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina. Dalam proses pembangunan dibutuhkan ruang lahan agar kilang minyak dapat berproduksi. Penetapan Lokasi lahan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/23/KPTS/013/2019 di 5 (lima) Desa Kecamatan Jenu. Desa tersebut merupakan Desa Sumurgeneng, Desa Wadung, Desa Mentoso, Desa Rawasan dan Desa Kaliuntu. Penetapan lokasi pada tanggal 10 Januari 2019 tersebut memicu konflik dengan adanya tindakan penolakan dari warga Desa Sumurgeneng. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber konflik adalah penetapan lokasi pada tanah Desa Sumurgeneng.

Konflik warga Desa Sumurgeneng dapat dikategorikan sebagai konflik realistik. Hal tersebut didasarkan oleh teori fungsi konflik oleh Lewis Alfred Coser. Pada teori tersebut disebutkan bahwa konflik dibagi dalam 2 tipe, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik merupakan tipe bersumber dari hal yang konkret. Hal tersebut dapat diperhitungkan karena bersifat materiil. Percontohan dari konflik realistik adalah perebutan kekuasaan dan perebutan tanah atau wilayah. Sementara konflik non-realistik merupakan konflik dengan sumber yang tidak dapat dipergitungkan. Konflik tersebut bersifat ideologis dan tidak rasional. Contoh dari konflik non-realistik adalah konflik antar-kepercayaan dan konflik antar-agama.

Konflik Desa Sumurgeneng dikategorikan sebagai konflik realistik karena merupakan konflik perebutan lahan antara warga Desa Sumurgeneng dengan PT Pertamina. Lahan yang diberebutkan akibat adanya penetapan lokasi dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur merupakan hal yang bersifat konkret dan materiil. Konflik tersebut termasuk dalam konflik perebutan wilayah sesuai dengan contoh yang ditulis oleh Lewis Alfred Coser. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa konflik pada Warga Desa Sumurgeneng terkait pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina merupakan konflik realistik.

4.2. Sebab-sebab Konflik Desa Sumurgeneng terkait Pembangunan Kilang Minyak

Konflik pada Desa Sumurgeneng terjadi karena penetapan lokasi pembangunan di Desa Sumurgeneng. Penetapan tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut memicu konflik di Desa Sumurgeneng. Warga merasa tanah di Desa Sumurgeneng merupakan tanah pertanian produktif yang mampu menghasilkan 3 kali panen dalam setahun. Sehingga kurang cocok jika dijadikan wilayah migas. Selain itu, dikhawatirkan warga bahwa mata pencaharian mereka sebagai petani akan hilang.

Konflik juga terjadi karena adanya manipulasi data pengadaan tanah, intimidasi pihak Pertamina kepada warga Desa Sumurgeneng, serta adanya kriminalisasi terhadap petani Desa Sumurgeneng. Manipulasi data pengadaan tanah terjadi saat penyebaran undangan dilakukan pada 8 Januari 2019 pukul 23.00 malam dengan menandatangani bukti terima undangan di mesin elektronik. Undangan berisi tentang konsultasi publik terkait pembangunan kilang minyak pada 9 Januari 2019. Berdasarkan pernyataan warga, persebaran undangan terkesan tidak sesuai aturan yang seharusnya disebar 3 hari sebelum pelaksanaan acara. Undangan seharusnya disebar kepada 400 warga dari Desa Sumurgeneng dan Desa Wadung, namun undangan hanya tersebar 150 undangan. Di Desa Sumurgeneng konsultasi publik hanya dihafiri oleh 40 warga saja. Hasil dari konsultasi tersebut ditolak oleh warga. Pada tanggal 10 Januari 2019, penetapan lokasi sudah terpasang di kantor Kecamatan Jenu Tuban. Oleh karena itu, warga yang tidak setuju bermusyawarah untuk melakukamn aksi penolakan.

Beberapa tindakan intimidasi dari pihak Pertamina juga menjadi penyebab terjadinya konflik. Diantaranya adalah konsultasi publik yang dijaga oleh anggota keamanan dari polisi, TNI, dan satpol PP sejumlah 120-an. Intimidasi juga terjadi saat anggota polisi dan satpol PP melakukan pengamanan dengan patroli di Desa Sumurgeneng setiap hari. Tindakan intimidasi lainnya adalah pencegahan anggota polisi saat warga Desa Sumurgeneng membangun gapura serta spanduk bertuliskan penolakan kilang minyak.

Kriminalisasi kepada petani Desa Sumurgeneng juga terlihat saat petasi di kecamatan Jenu meminta izin kepada polsek Jenu terkait demonstrasi yang akan digelar. Namun, warga tersebut diarahkan ke polres Tuban dan ditahan. Selain itu terdapat tindakan tercermin kriminalisasi saat warga membentangkan spanduk penolakan kilang minyak bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi. Pembentangan spanduk direspon oleh anggota kepolisian dengan menahan warga yang membentangkan spanduk. Saat ditahan, dokumentasi video dan gambar dihapus oleh polisi. Kriminalisasi juga tercermin pada tindakan polisi yang merobohkan gapura warga bertuliskan penolakan kilang minyak. Kriminalisasi pemasangan patok lahan dijual tanpa izin dari kepala desa dan warga juga menimbulkan konflik.

Tindakan perlawanan warga juga memivu kondisi konflik yang semakin intens. Warga melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Tuban,, memblokade jalan BPN saat melakukan pengukuran tanah. Warga juga mencabut patok penjualan tanah secara diam-diam. Warga juga aktif melindungi hak tanah mereka dengan menyampaikan keberatan mereka ke sejumlah lembaga legislatif, seperti PTUN, Komnas HAM, Demonstrasi di depan gedung DPRD.

Sebab-sebab konflik yang terjadi di Desa Sumurgeneng tersebut terdapat kesesuaian dengan kajian Rantai Penjelaras Konflik Agraria oleh Noer Fauzi Rachman. Pada kajian tersebut dituliskan 4 (empat) penyebab konflik. Pertama, Konflik terjadi karena adanya perizinan oleh pejabat publik terkait penggunaan lahan sebagai ruang produksi badan perusahaan besar. Pejabat publik terkait pembangunan kilang minyak di Tuban adalah Presiden beserta pemerintah pusat, Gubernur Jawa Timur serta pihak PT Pertamina. Pejabat publik tersebut memberikan izin melalui kebijakan-kebijakan seperti Perpres Nomor 3 tahun 2016, surat keputusan gubernur provinsi Jawa Timur. Surat keputusan menteri ESDM. Surat tersebut digunakan sebagai bentuk persetujuan pejabat publik terhadap badan besar perusahaan yaitu Pertamina dalam kebutuhan ruang lahan.

Konflik juga terjadi karena adanya perilaku kekerasan, manipulasi, intimidasi, penipuan, serta kriminalisasi demi tercapainya pembangunan proyek besar oleh perusahaan. Konflik yang terjadi akibat pembangunan kilang minyak di Tuban tidak ditemukan perilaku kekerasan maupun penipuan

namun terdapat indikator-indikator seperti manipulasi data pengadaan tanah, intimidasi dari pihak Pertamina kepada warga Desa Sumurgeneng, serta kriminalisasi terhadap warga Desa Sumur Geneng yang melakukan aksi protes.

4.3. Konflik External memperkuat Solidaritas Warga Desa Sumurgeneng

Diketahui bahwa konflik external merupakan konflik bersumber dari ancaman luar kelompok. Konflik external pada pembangunan kilang minyak adalah hilangnya hak kepemilikan tanah warga Desa Sumurgeneng akibat penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Konflik external tersebut membuat rasa keterikatan dan kesadaran warga Desa Sumurgeneng menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan warga Desa Sumurgeneng yang membatasi interaksi dengan pihak luar.

Konflik external tersebut membuat warga Desa Sumurgeneng melakukan musyawarah dan melakukan doa bersama dalam bentuk istighosah dan ritual bucuhan untuk menolak kilang minyak. Dalam menyampaikan rasa kekecewaan karena ada penetapan lokasi pembangunan kilang minyak di lahan warga, maka mereka melakukan aksi demonstrasi kepada pihak Pertamina dan sejumlah pihak pemerintah secara kompak. Hal tersebut terbukti dari demonstrasi di depan Gedung DPRD kabupaten Tuban yang diikuti oleh petani di Kecamatan Jenu. Solidaritas juga tercermin pada kebersamaan dan kesadaran warga dari Desa Sumurgeneng dan Desa Wadung sejumlah 4.100 warga untuk menandatangani petisi penolakan kilang minyak.

4.4. Perilaku Menyimpang Anggota Internal

Konflik external yang membuat warga Desa Sumurgeneng membatasi tindakan interaksi dengan kelompok luar membuat warga tidak lagi toleransi dengan perilaku yang menyimpang diantara kelompok tersebut. Pada penelitian ditemukan perilaku menyimpang dari Kepala Desa Sumurgeneng periode 2019 beserta perangkat desa. Kepala desa diduga menyetujui pemasangan patok penjualan lahan tanpa konfirmasi dengan warga Desa Sumurgeneng. Saat diminta pertanggungjawaban, Kepala Desa tidak mengetahui hal tersebut. Namun saat dipengadilan, Kepala Desa memutar balik fakta bahwa ia diancam oleh pihak warga Desa Sumurgeneng. Selain itu, kepala desa beserta perangkat desa terlibat dalam penyebaran undangan konsultasi publik. Perilaku kepala desa dan perangkat desa tersebut mengganggu struktur internal dengan hilangnya kepercayaan warga Desa Sumurgeneng kepada pengelola desa.

4.5. *Safety Valve* Desa Sumurgeneng

Diketahui bahwa terdapat kelompok khusus dalam upaya mengkoordinasi aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan kepada pihak Pertamina. Hal tersebut sesuai dengan teori fungsi konflik oleh Lewis Alfred Coser, dimana terdapat kelompok khusus untuk meminimalisir ketegangan konflik yang terjadi. *Safety valve* pada konflik warga Desa Sumurgeneng terdapat dua kelompok. Kelompok tersebut bukan kelompok yang berlawanan namun kelompok yang memiliki cara penyampaian aspirasi berbeda. Anggota kelompok tersebut juga tidak berbeda jauh. Kelompok tersebut bernama Golongan Pemuda Tani dan Tuban Darurat Agraria.

Golongan Pemuda Tani bertindak dalam musyawarah yang nantinya akan disebar dan disampaikan melalui *whatsapp*. Golongan Pemuda Tani merencanakan aksi-aksi protes kepada Pertamina. Termasuk membahas bab-bab hukum guna mengajukan protes kepada lembaga legislatif, seperti Komnas HAM, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan DPRD. Golongan Pemuda Tani mengedepankan aksi

secara langsung. Sementara Tuban Darurat Agraria cenderung menyampaikan protes melalui media sosial. Penyampaian tersebut dilakukan pada media sosial youtube dan facebook. Penyampaian dilakukan dengan menggunakan hashtag #TUBANDARURATAGRARIA; #TUBANORADIDOL; serta #TUBANTIDAKBAIK-BAIKSAJA. Tuban Darurat Agraria mengunggah dokumentasi aksi-aksi demonstrasi diselingi narasi puisi pada akun youtube. Pada akun tersebut juga terdapat film dokumenter dengan judul “NAMAKU TOLANG” mendeskripsikan aksi-aksi warga petani Jenu dan tindakan pihak pertamina.

5. Kesimpulan

Percepatan pembangunan infrastruktur bidang migas merupakan salah satu kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) guna menumbuhkan laju ekonomi. Salah satu program PSN adalah pembangunan kilang minyak NGRR di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Kilang tersebut akan menambah kapasitas ketersediaan minyak sehingga mengurangi impor dari negara lain. Proses pembangunan kilang memicu konflik terkait pembebasan lahan di Desa Sumurgeneng, salah satu desa ring satu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab konflik, analisa konflik berdasarkan teori fungsi konflik Lewis Alfred Coser, dan identifikasi dampak dari pembangunan. Metode pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik terjadi karena adanya manipulasi data pengadaan tanah, intimidasi dari pihak pemerintah terhadap warga Desa Sumurgeneng, kriminalisasi petani saat melakukan demonstrasi. Konflik yang terjadi pada Desa Sumurgeneng merupakan konflik realistik karena konflik bersumber pada materiil yaitu tanah yang diperebutkan. Konflik eksternal pada penelitian berupa kebijakan pemerintah terkait lokasi pembangunan kilang minyak dan tindakan pihak pertamina serta pemerintah terhadap petani yang menyampaikan aspirasi tentang pembebasan lahan. Konflik eksternal tersebut memperkuat solidaritas warga Desa Sumurgeneng untuk mempertahankan hak tanah mereka. Solidaritas warga Desa Sumurgeneng tercermin pada aksi-aksi perlawanan yang dilakukan. Konflik tersebut mengkategorikan pihak-pihak terkait dalam kelompok In-group dan out group. Kelompok in-group terdiri dari warga yang kontra terhadap pembangunan dan kelompok out-group terdiri dari pihak yang pro pembangunan. Terdapat kelompok khusus bernama Gerakan Pemuda Tani Sumurgeneng dan Tuban Darurat Agraria. Kedua kelompok tersebut memiliki kriteria sebagai safety valve sebagai wadah aspirasi konflik yang berkeaja. Akibat dari konflik menemukan bahwa petani kehilangan wilayah pertanian yang produktif sehingga kehilangan mata pencaharian.

Daftar Pustaka

- [1] Cresswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar..
- [2] Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-36. Bandung: PT. Rosdakarya Offset
- [3] Hidayatun dan Mutiah. 2019. ” Komuikasi Ritual Masyarakat Terdampak Dalam Menolak Pembangunan Kilang Minyak New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumurgeneng, Jenu-Tuban”. *Jurnal Commecium*. Vol. 02 (2): hal 51-54.

- [4] Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I, Terj. Robert Lawang, (Jakarta: PT Gramedia, 1986)
- [5] Rosa Gamayanti dan Soni Akhmad Nulhaqim, “*konflik antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari*”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 01. NO.01
- [6] Intan Diany Rachmawati dan Pambudi Handoyo. 2014. “Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo di Sidoarjo”. *Jurnal Paradigma*. Vol. 02 (3): hal 1
- [7] Fransiskus X. Gian Tue Mali. 2015. “Negara VS Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT”. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. Vol. 11 (2)
- [8] Risdiyanta. 2018. “Mengenal Kilang Pengolahan Minyak Bumi di Indonesia”. *Jurnal Forum Teknologi*”. Vol. 05 (4)
- [9] Kurnia Puspita Sari dan Sugeng Harianto. 2018. “Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik”. *Jurnal Paradigma*. Vol. 06 (1)
- [10] Wahid Nur Tualeka. 2017. “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 03 (1).